BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi saat ini dikenal sebagai usaha untuk mengembangkan potensi baik potensi dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berguna untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Upaya pemberdayaan tersebut akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun saat ini pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan hanya dengan upaya peningkatan produktivitas saja namun dengan adanya kemitraan dan kerjasama yang erat antara yang maju, dengan yang lemah dan yang belum berkembang.

Menurut Ginandjar Kartasasmita Pemberdayaan Ekonomi yaitu "*upaya pengerahan sumber daya guna untuk mengembangkan pontensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dalam meningkatkan produktivitasnya sehingga baik dari sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat berkembang dengan baik".*[1] Disisi lain Prijono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah yang memperbesar pengaruhnya terhadap

[1]Pemberdayaanekonomi**,**https://www.pendidikanekonomi.com/PemberdayaanEkonomi Diakses pada 7 Desember 2018,pkl 14.00 WIB.

proses dan hasil pembangunan .lemah yang memperbesar pengaruhnya terhadap proses dan hasil pembangunan[2].

Adapun arti dari pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia dalam lingkungannya, baik dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Dan aspek-aspek tersebut bisa dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan.[3]

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment* secara leksikal , pemberdayaan berarti penguatan. Adapun secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Adapun maksut dari pernyataan tersebut bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan

[2]Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam pembangunan*dalamjurnal*FIP/://http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR._SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL

[3]Femy Dan Very , Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, *dalam jurnal LPPM bidang Ekososbudkum*, Vol 1 no 1 tahun 2014

atau keberdayaan kelompok lemah masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.[4] Adapun sebagai tujuan bahwa pemberdayaan menunjuk pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahaan sosial. yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik, ekonomi ataupun sosial. seperti halnya memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri.[5]

Pemberdayaan ekonomi saat ini dikenal sebagai usaha untuk mengembangkan potensi baik potensi dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berguna untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Upaya pemberdayaan tersebut akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun saat ini pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan hanya dengan upaya peningkatan produktivitas saja namun dengan adanya kemitraan dan kerjasama yang erat antara yang maju, dengan yang lemah dan yang belum berkembang.

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut ini :

---

[4] Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam* : dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2001),hlm . 41-42

[5] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Refika Aditama,2005), hlm. 59-60

a. Kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat.

b. Kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar-menawar masyarakat terhadap Negara dan tekno struktur (dunia bisnis).

c. Paham tentang tentang strategi untuk lebih baik artinya mementingkan keswadayaan dan kemandirian.

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut pada lapisan bawah atau masyarakat yang miskin yang tertindas oleh sisitem dan struktur sosial. adapun upaya pemberdayaan menyangkut beberapa segi. *Pertama*, penyadaran dan peningkatan kemampuan identifikasi persoalan, yang *kedua*, penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan kepercayaan kepada diri sendiri, dan yang *ketiga*, meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya yang telah ditemukan. Maksutnya pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi-politik yang bertujuan membuka akses untuk golongan bawah, lemah dan tertindas.[6]

Pada era perkembangan zaman seperti saat ini masyarakat banyak yang sudah mulai mengenal bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini

[6] M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta : Lembaga Study Agama dan Filsafat,1999), hlm. 354-355.

bisa ditinjau dari empat konsep pemberdayaan menurut Sumodiningrat yang telah dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo[7] sebagai berikut :

a. Perekonomian rakyat : perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas hal tersebut berguna untuk menjalankan roda perekonomian
b. Pemberdayaan ekonomi rakyat : usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan memiliki daya saing. Dimana pemberdayaan tersebut dilakukan dengan perubahan structural.
c. Perubahan struktural : perubahan untuk merubah yang tradisonal ke modern, dari yang lemah ke yang kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dan dari yang ketergnatungan ke kemandirian.
d. Pemberdayaan ekonomi rakyat : memerlukan kerjasama kemitraan untuk membuatnya lebih berkembang dan maju dari yang sebelumnya.

3. Pemberdayaan menurut Perspektif Ekonomi Islam

Konsep Pemberdayaan menurut Moh. Ali Aziz dalam buku dakwah pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dengan fokus kekuasaan. Dimana pemberdayaan secara substansial adalah proses memutus hubungan antara subyek dan obyek. Adapun

[7] RD Hidayah,Pemberdayaan Masyrakat *dalam jurnal eprints.uny.ac.id*,2013, diakses pada 21 Desember 2018,pkl 14.30 WIB

pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek baru sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.[8] Sedangkan Pemberdayaan Islam menurut Amrulloh Ahmad dalam pengembangan masyarakat Islam yaitu dengan sebuah sistem tindakan yang nyata dimana tindakan tersebut menawarkan altenatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif islam.[9]

Adapun pemeberdayaan masyarakat pada umunya bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada di masyarakat supaya mampu meningkatkan kualitas dan standar hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Paul A. Samuelson dari Monzer Kahf dalam ekonomi islam dimana ekonomi merupakan kajian tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber yang dianggap produktif yang langka untuk memproduksi barang ataupun jasa yang akan di distrubusikan.[10]

4. Tahap - Tahap Pemberdayaa

Adapun menurut Sumodiningrat,[11] bahwa pemberdayaan tidak selamanya dilakukan namun ada target sampai masyarakat mampu

---

[8] Moh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*,(Yogyakarta : Pustaka Pesantren,2005),hlm.169

[9] Nanih Machendrawati, dkk. *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung : Rosdakarya,2001), hlm.29

[10] Monzer Kahf ,*Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,1995),hlm2

[11] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm 82-83

untuk mandiri. Kemudian sampai tahap dilepas untuk mandiri, dan selanjutnya harus dijaga agar kemandirian tersebut tidak lepas begitu saja. Dengan demikian bahwa

pemberdayaan itu merupakan suatu proses belajar sehingga mencapai status mandiri. Dalam rangka menjaga kemandirian tersebut maka dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus agar tidak mengalami kemunduran suatu saat nanti. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Berikut ini merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebagai berikut :

1. *Tahap penyadaran* dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. *Tahap transformasi kemampuan* berupa wawasan pengetahuan, kecakapan,ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil di dalam pembangunan.
3. *Tahap peningkatan kemampuan intelektual,* kecakapan, ketrampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Adapun tahap yang pertama yakni tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dimana pada tahap ini pihak pelaku

pemberdayaan berusaha untuk menciptakan prakondisi agar dapat memfasilitasi secara langsung proses pemberdayaan secara efektif dan juga untuk mencapai kesadaran konotatif yang diharapkan.

Dimana dengan sentuhan penyedaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi pada saat itu.Sehingga secara tidak langsung akan merangsang kesadaran mereka tentang perlunya perbaikan untuk memperbaiki kondisi sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik. Sebagaimana halnya dengan sentuhan akan rasa ini nantinya akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk dapat meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan.

Dengan semangat tersebut akan membuat masyarakat sadar akan kemauan untuk belajar. Lalu masyarakat akan mulai merasa membutuhkan pengetahuan serta ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.Pada tahap kedua, yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berjalan dengan baik, semnagat, dan dapat berjalan secara efektif jika dapat mengkondisikan tahap pertama. Dimana masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntunan kebutuhan tersebut. Dimana hal tersebut akan membuka wawasan dan menguasai kecakapan dan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Dan di tahap ini masyarakat hanya memberikan

peran pada tingkat rendah. Yaitu sebagai pengikut atau obyek pembangunan.

Untuk tahap ketiga, yaitu masuk pada tahap pengayaan atau tahap peningkatan intelektualitas serta kecakapan ketrampilan yang mereka butuhkan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Hal tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi dan melakukan inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat sudah masuk pada tahap ini biasanya masyarakat sudah dapat melakukan pembangunannya secara mandiri.

Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam tahap ini masyarakat sudah menjadi subyek atau pemeran utama dalam pembangunan sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitatornya saja. Sebagaimana menurut Hogan yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku Intervensi Komunitas yang mengambarkan suatu proses pemberdayaan yang berkesinambungan dengan siklus 5 tahapan sebagai berikut ini : [12]

1) Menghadirkan lagi pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experience)*

[12] Isabandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta : Rajawali Press,2008*)*,hlm.85

2) Mendiskusikan alasan mengenai pemberdayaan dan penindakberdayaan (*discussion reason for depowerment/empowerment)*

3) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek *(identify one problem or project)*

4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan *(indentifity useful power bases*),dan

5) Pengembangan rencana-rencana aksi dan mengimplementsiannya (*develop and implement action plans)*

Sebagaimana penjelasan tersebut pemberdayaan dianggap sebagai program, dimana program tersebut harus direncanakan dengan serius dan difokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat lebih pandai serta mampu mengembangkan komunikasi sehingga masyarakat dapat saling berdiskusi secara konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat agen pengubah adalah seorang *muzakki* dan *amil* atau biasa disebut fasilitator yang memberi fasilitas kemudahan bagi masyarakat.

Dimana Fasilitator tersebut lebih berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan diri agar lebih mandiri apabila masa programnya selesai. maksutnya mandiri dalam konteks pemberdayaan ekonomi yaitu mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melalui

program yang telah dibuat koperasi maka dapat meingkatkan pendapatan *mustahiq* sehingga suatu saat bisa menjadi *muzakki*.

5. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kusnadi dikutip oleh Widayatimengatakan bahwa ada beberapa indikator kualitatif yang menandai suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan, yaitu[13]:

a. Tercapainya kesejahteraan baik dibidang sosial-ekonomi baik dalam individu itu sendiri, rumah tangga maupun dalam masyarakat.
b. Kelembagaan ekonomi yang berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi yang stabil.
c. Kelembagaan sosial yang berfungsi dengan baik sebagai instrumen pembangunan masyarakat lokal.
d. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi baik dalam hal mendapatkan informasi dan kemampuan menggunakan teknologi yang modern.
e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan tumbuhnya kesadaran warga terhadap persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir pantai.

[13] Priskila Mustika Hayuning Pratama Soero, Dwi Sulistyo, Ainul Hayat ,Pemberdayaan Istri Nelayan melalui Koperasi Unit Desa *dalam jurnal*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal. 41-46 Universitas Brawijaya Malang

f. Kawasan pesisir yang menjadi pusat partumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

6. Program-program Pemberdayaan

Untuk melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diperlukan berbagai program kegiatan seperti berikut ini[14] :

a. Memberikan bantuan pinjaman modal melalui program nasional pemberdayaan pedesaan
b. Pengembangan motivasi bekerja dan diadakan pelatihan kerja
c. Serta melakukan pelatihan ketrampilan usaha ekonomi

Sebagaimana program kegiatan tersebut bahwa bantuan pinjaman modal usaha berkaitan dengan kredit lunak bertujuan untuk mengembangkan usaha dari masyarakat desa. Sedangkan dalam pengembangan motivasi kerja yakni kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong dan memotivasi usaha masyarakat sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri.

Adapun peningkatan motivasi dapat dilihat dari semangat mereka dalam menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang terdapat di desa tersebut. Untuk kegiatan pelatihan ketrampilan usaha yang dilakukan juga sama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengetahuan dan

[14] Femy Dan Very , *Peningkatan Pendapatan*…..hal 96

ketrampilan yang mereka miliki dalam mengelolan dan menjalankan usahanya.

B. Strategi Pemberdayaan

1. Pengertian Strategi

Menurut Stephanie KM Marrus[15] strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Maksutnya bahwa dengan adanya strategi tersebut keinginan yang hendak dicapai koperasi nelayan akan lebih mudah tanpa adanya strategi maka usaha yang dijalankan akan tidak terkontrol dengan baik.

Adapun definisi strategi secara khusus menurut Hamel dan Prahalad bahwa strategi adalah tindakan yang sifatnya *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan pelanggan di masa depan. Sehingga dengan adanya hal tersebut perencanaan strategi hamper dimulai dengan“apa yang dapat terjadi“ bukan dimulai dari “apa yang terjadi ”. Dimana terjadinya percepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen yang memerlukan suatu kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.[16]

---

[15] Husein,Umar. *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2001),hlm.33

[16] Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus BIsnis Analisis SWOT*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006),hlm342

2. Konsep Strategi Pemberdayaan

Strategi Pemberdayaan yang dapat dilakukan sebagai berikut: [17]

1) Strategi pertumbuhan, pendekatan yang bisa dilakukan yaitu pendekatan yang berbasis pada pertumbuhan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh masyarakat salah satu caranya dengan peningkatan produksi .
2) Strategi kesejahteraan, pendekatan yang berbasis kesejahteran masyarakat. hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti fasilitas-fasilitas yang diperlukan atau dibantu oleh dinas dan pemerintah yang terkait.
3) Pendidikan dan pelatihan, dengan adanya pendidikan dan pelatihan kusus maka masyarakat bisa mengembangkan bakatnya supaya bisa berkembang dengan menggali potensi-potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat.
4) Pengembangan usaha, ini merupakan suatu strategi pemberdayaan masyarakat yang biasanya mencangkup usaha perikanan tangkap, pengolahan, maupun pemasaran termasuk perkuatan manajemen usaha serta fasilitas permodalan.

3. Dampak Strategi Pemberdayaan Koperasi

Dalam KBBI dampak adalah benturan dari pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik itu positif/negatif). Dalam kaitannya dengan

[17] Kusnadi, *Strategi dan Jaminan Sosial Nelayan*, (Yogyakarta : LKIS,2007), hlm18

ekonomi dampak memiliki arti pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian. Untuk kaitannya politik dampak bermakna suatu keputusan, tindakan, atau peristiwa terhadap sikap masyarakat. Adapun menurut golongan dampak dibagi menjadi dua yaitu : *Dampak positif* yang bermakna pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang positif, *Dampak negatif* yang bermakna pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negatif.[18]

Tabel 1.3

Tabel Pengelompokan dampak kebijakan[19]

No	Jenis Kebijakan	Dampak Kebijakan	Ukuran
1	Kebijakan Positif	Menyejahterakan	-Dirasakan oleh masyarakat luas -Melibatkan masyarakat Luas
2	Kebijakan Negatif	Menyengsarakan	-Munculnya pengusaha baru -Menguntungkan perekonomian sebagian individu ataupun kelompok

Sumber:http://digilib.uin-suka.ac.id

Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Strategi adalah rencana yang cermat mengani kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Adapun strategi dalam penelitian ini adalah strategi pemberdayaan masyarakat. Untuk Pemberdayaan sendiri adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu

[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2008), hal.290

[19]Rahardian Aditya,"Dampak Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Produk Lokal : Durian Menoreh Kuning dan Jambon Serta Batik Motif Geblek Renteng di Kabupaten Kulon Progo",dalam jurnal *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

atau bertindak, sedangkan masyarakat artinya sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Jadi pengertian pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan dengan akalnya. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa dampak strategi pemberdayaan masyarakat adalah rencana yang cermat mengenai suatu proses yang membuat masyarakat memiliki kemampuan dalam melakukan tindakannya melalui akalnya.[20]

4. Strategi menurut Perspektif Ekonomi Islam

Semenjak zaman Rasulullah SAW umat islam telah berhasil menggeluti dunia bisnis atau perdagangan. Seperti halnya Rosululloh dan para sahabatnya yang banyak menjadi pengusaha besar dan bisnisnya melewati batas teritorial Mekkah dan Madinah. Adapun mereka dapat membangun bisinisnya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah. Baik dalam transaksi, manajemen, hubungan transaksi perdagangan, serta pengambilan keputusan bisnis yang berlandasakan pada nilai-nilai keislaman.[21]

Sebagaimana hal tersebut bahwa dalam berbisnis seharusnya dilakukan sesuai dengan ajaran islam yang di dalam berbisnis mempunyai aturan dan batasan-batasan tertentu :

---

[20] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2008), hal.885

[21] Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,2002),h.i

1. Niat baik

Artinya bahwa dalam berbisnis niat baik sebagai pondasi dari amal perbuatan manusia. Jika niat yang terkandung dalam berbisnis itu baik dank arena sebagai bentuk beribadah kepada allah maka bisnis yang akan kita jalankan akan dimudahkan dan mendapatkan keberkahan. Maka dari itu dalam berwirausaha setiap muslim dituntun agar usaha yang ditekuni tersebut bukan hanya untuk mencari keuntungan saja namun juga ridha allah.[22]

Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Q.S. Al-An'am ayat 162-163 :

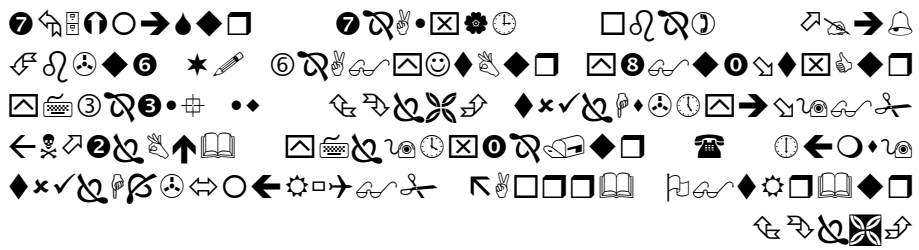

Artinya : "*Katakanlah : Sesungguhnya sembahyangku, ibdahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah) " (Q.S. Al-An'am : 162-163)*[23]

Adapun maksudnya semakin seseorang ikhlas dan mempunyai niat yang baik dalam menjalankan aktivitas hidupnya (berwirausaha) maka Allah akan memberikan pertolongan dalam setiap usaha yang dilakukan untuk

[22] *Ibid*.,hal 15

[23] M.Quraish Shibab, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*,(Jakarta : Lentera Hati,2001),hal.17

mengembangkan bisnisnya dan batuan allah akan terus mengalir seiring dengan niat yang baik dalam hatinya.

2. Berinterkasi dengan akhlak

Dalam rancangan bangunan ekonomi islam, akhlak adalah bangunan puncaknya. Karena akhlak merupakan tujuan dakwah para nabi berupa penyempurnaan akhlak manusia.

Berikut ini merupakan akhlak dasar yang seharusnya dimiliki oleh pebisnis muslim :

a. Jujur

Dalam mengembangkan harta, seseorang harus menjunjung tinggi kejujuran. Karena untuk memperbaiki kinerja bisnis maka perlu tingkat kejujuran yang tinggi sehingga tujuan-tujuan perusahaan akan tercapai. Bukan hanya itu dengan kejujuran maka dapat menghapus dosa, mencegah kecurangan, dan dapat mengantarkan manusia menuju surga-Nya Allah. [24] sebagaimana firma Allah

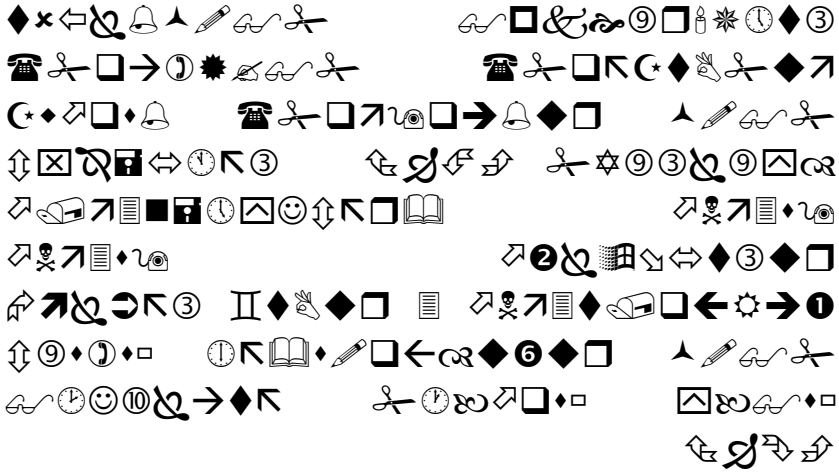

[24] Ma'aruf Abdulloh, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin : Antasari Perss,2011), hlm.18

Artinya :”*Hai, orang-orang yang berimana,bertakwalah kamu kepada Alloh dan Katakanlah perkataan yang benar. Niscahya Alloh memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenagan yang besar. (Q.S. Al-Ahzab : 70-71)”*

Jika dalam berdagang kita jujur maka, kita akan dipercayai oleh pelanggan dan disukai oleh pelanggan kita, sehingga hal tersebut akan menunjang kelancaran bisnis yang kita lakukan. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan, dimana banyak pembeli yang sangat memerlukan informasi yang akurat. Dan kita sebagai pelanggan hendaknya memberikan informasi yang sesuai dengan spesifikasi produk yang kita jual.[25]

b. Amanah

Artinya dapat dipercaya (al-amin) maksutnya kedudukan seseorang yang dapt dipercaya. Adapun yang dimaksut amanat bukan hanya menjaga harta, dalam dalam bekerja seseorang juga harus dapat menjaga nama baik perusahaannya dan amanat untuk memberikan informasi kepada pihak tertentu.

Seperti yang terkandung dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 :

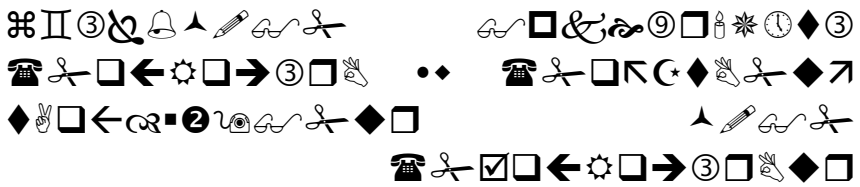

[25] Rizka Abdulloh, “Kiat menjadi Orang Kaya*” dalam artikel* Desember 2015,hal 13-14, diakses pada 27 Desember 2018, pkl 07.30 WIB

Artinya : “*Hai, orang- orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rosul Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat- amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” Q.S Al-Anfal ayat 27*[26]

Adapun dalam syariat Islam mengajarkan bahwa dalam berwirausaha hidupkan mata hati untuk menegakkan sikap amanah. Karena dalam sikap amanah juga akan menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia sehingga ia tidak akan lalai dalam menjaga kewajibannya. Misalnya dalam berdagang juga amanah bisa dilihat dari pedagang yang menjelaskan kepada calon pelanggannya bahwa kondisi barang yang dijual misalnya rusak/ cacat sehingga harga yang diberikan sekian. Hal tersebut termasuk amanah dan menjadi berkah dalam kehidupannya.

c. Toleran

Maksutnya dengan adanya sikap toleran yang dimiliki oleh pebisnis muslim maka, hal tersebut akan memberikan banyak manfaat dan memudahkan urusan transaksi bisnisnya, dapat mempermudah hubungan yang baik dangan calon pembeli dan mempercepat perputaran modal.[27]

Alloh berfirman :

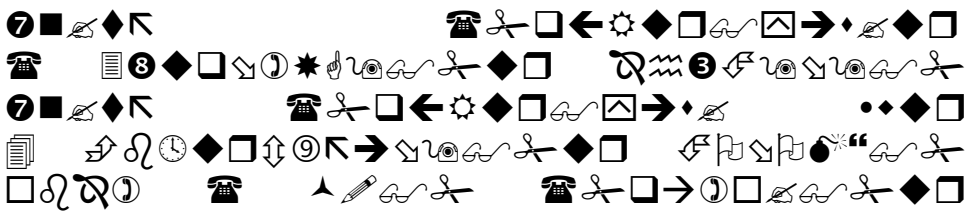

[26] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir ayat-ayat Ekonomi Islam* ,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010),hlm.11

[27] Ma’aruf Abdulloh, *Wirausaha*…hlm.22

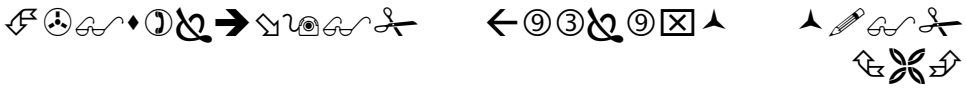

Artinya : “*dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesunguhnya Allah Amat berat siksaNya.” (Q.S. Al- Maidah ayat 2)*[28]

Sebagaimana maksut dari surah yang tersebut bahwa Allah akan mencurahkan rahmat bagi orang- orang yang mau untuk bertoleran baik ketika membeli, menjual ataupun mangasih hutang. Dan toleran merupakan bentuk dari ketaqwaan kita kepada Allah jika kita sebagai manusia tidak menaati perintahNya maka sungguh siksa Allah itu sangat pedih.

d. Menepati Janji

Maksutnya menepati janji itu tidak ingkar atau semua bentuk komitmen yang telah disepakati. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menepati janji. Karena janji adalah hutang,dan hutang itu harus dibayar.[29] Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282

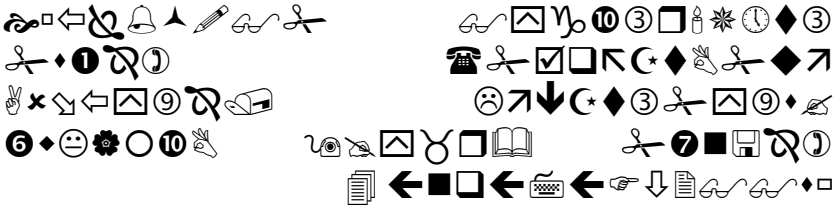

[28] Kementrian Agama RI. *Al- Qur’an*….hlm.106
[29] Ma’aruf Abdulloh, *Wirausaha*…hlm.23

Artinya :"*Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Q.S Al-Baqarah : 282)*[30]

Sebagaimana yang terkandung dalam surah tersebut bahwa umat muslim yang tidak menepati janji termasuk orang-orang yang munafik, karena janji itu layaknya hutang yang harus dibayar dan harus ditepati. Allah juga memerintahkan kepada manusia yang hendak bermuamalat bahwa dalam melakukan transaksi perjanjian bisnis tertulis hitam diatas putih dengan ketentuan yang jelas supaya tidak terjadi perselisihan diantara keduanya.

C. Koperasi Serba Usaha

1. Pengertian koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang berbentuk hukum yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia. Di Indonesia sendiri koperasi sudah diperkenalkan oleh Bung Hatta yang dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.[31]Adapun koperasi menurut menurut Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian di Indonesia adalah badan usaha yang berangotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

---

[30] Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an dan…*hlm.48

[31] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2014),hlm.253

Dalam artian lain menurut Kamaralsyah dalam buku Sudarsono dan Edilius bahwa koperasi[32] adalah sebuah badan usaha bersama bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan masyarakat yang ekonominya lemah, bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggota. Sedangkan menurut Istilah kata koperasi berasal dari bahasa Inggris "*cooperation*" dan menurut bahasa arab mempunyai padanan kata syirkah yang merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.[33]

Berikut ini merupakan Prinsip Operasional Koperasi secara internal dan eksternal :

a. Keanggotaan sukarela dan terbuka
b. Pengendalian oleh anggota secara demokratis
c. Partisipasi ekonomis anggota
d. Otonomi dan kebebasan
e. Pendidikan, pelatihan dan informasi
f. Kerjasama anatar koperasi
g. Kepedulian terhadap komunitas.[34]

[32] Sudarsono dan Ediluis, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT Renika Cipta,2005),hlm 1
[33] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2013),hal.93
[34] Ibid.,hal.97

2. Fungsi Koperasi

Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari koperasi sebagai berikut[35] :

1) Melakukan pengkreditan melalui pengembangan modal yang diperlukan untuk bisnis atau keperluan bagi anggotanya
2) Membuat fasilitas-fasilitas perbankan yang terjangkau menerima simpanan dan tabungan tetap bagi anggotanya
3) Pengadaan bahan-bahan untuk bisnis atau untuk para keluarga anggotanya
4) Mengadakan kegiatan-kegiatan dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum untuk bisnis atau untuk keperluan angotanya
5) Aktivitas-aktivitas pencegahan kecelakaan laut, bencana alam, dan perantara asuransi kapal ikan untuk anggotanya.
6) Promosi manfaat dan kesejahteraan para anggotanya
7) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang meliputi peningkatan teknik penangkapan ikan para anggotanya
8) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan perkoperasian untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perkoperasian dan memberikan informasi bagi anggotanya.

Adapun fungsi koperasi syariah tidak berbeda dengan koperasi lainnya yakni sebagai penghimpun dana dan pembiayaan. Selain itu terletak pada prinsip dari penghimpun dana dan pembiayaan

[35] Ahmad Sudrajat, *Glosarium Kelautan Dan Perikanan, (*Jakarta : Badan Riset Kelautan dan Perikanan,2006),hlm 80

selain berlandaskan peraturan hukum positif namun berlandaskan hukum agama islam. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi.

1. Syarat keanggotaan koperasi sebagai berikut :
   a. Setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan koperasi yang memenuhi persyaratan.
   b. Menerima landasan dan asaz koperasi
   c. Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan haknya sebagai anggota
2. Sifat keanggotaan koperasi sebagai berikut :
   a. Terbuka dan sukarela
   b. Dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran terpenuhi dasar.
   c. Tidak dapat dipindah tangankan

   Berakhirnya keanggotaan koperasi apabila meninggal dunia, meminta berhenti karena kehendak sendiri, diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Kewajiban anggota koperasi juga terdapat pada UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 20 sebagai berikut :

   a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati anggota
   b. Berpartisipasi dalam kegaiatan usaha yang diselenggarakan

c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan

Menurut UU No.25 Tahun 1992 Pasal 20, Hak anggota koperasi sebagai berikut ini :

a. Menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota
b. Memilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar.[36]

3. Jenis - Jenis Koperasi di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No. 17 tahun 2012 terdapat dua macam koperasi adapun koperasi tersebut berbentuk koperasi primer dan sekunder sebagai berikut ini :

a. Koperasi Primer (*Primary Cooperative*)

Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya orang perorangan dimana pada intinya anggota-anggota tersebut sebagai badan hukum koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Koperasi primer umumnya beroperasi di tingkat lokal. Diatas koperasi primer semuanya itu disebut koperasi sekunder yaitu koperasi yang anggota-anggotanya merupakan badan hukum koperasi.

[36]http://googleweblight.com/i?u=http//rojanirtaamarthaianbsk.blogspot.com/2017/09/makalah-koperasi-syariah-dan.htnl?m%3D1&hl=id-ID Diakses pada tanggal 9 Desember 2018, Pkl 12.30 WIB

b. Koperasi Sekunder (*Sacondary Cooperative)*

Pengertian koperasi sekuder meliputi semua jenis koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan koperasi sekunder.

Adapun berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan.

Dalam pasal 48 UU No. 17 Tahun 2012, menyebutkan jenis-jenis koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam

   Adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai usaha stu-satunya yang melayani anggota.

2. Koperasi Konsumen

   Adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

3. Koperasi Produsen

   Adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh anggota kepada anggota dan non anggota.

4. Koperasi Jasa

Adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.[37]

4. Tujuan Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah dimana koperasi yang kegiatan usahanya diberbagai segi perekonomian seperti bidang produksi, konsumsi, pengkreditan, dan jasa. Dimana koperasi Serba Usaha juga memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut :

a. Simpan pinjam atau Pengkreditan.
b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari.
c. Pengelolaan serta pemasaran hasil.

Koperasi serba usaha memiliki beberapa tujuan, yaitu :

a. Menyejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat umum
b. Membangun tatanan perekonomian serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan juga makmur
c. Meningkatkan dan menyejahterakan anggota koperasi
d. Memberikan pelayanan pinjaman, serta mendidik anggota koperasi dalam mengembangkan dana secara bijaksana dan produktif.

[37]Pipit Mustafa,"Peran Kredit Dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Sukses terhadap Perkembangan Usaha Mikro Yang menjadi Anggotanya Di Kota Semarang" *dalam jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang 2013,Tidak dipublikasikan.

e. Memenuhi kebutuhan sehari hari dan perkantoran anggota koperasi.[38]

5. Koperasi menurut Perspektif Ekonomi Islam

Koperasi Syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) yang saat ini tumbuh subur dan berkembang di tengah masyarakat yang mulai sadar tentang pengelolaan keuangan yang berdasarkan ajaran islam. Jumlah koperasi syariah per April 2012 sekitar 4.117 unit dengan jumlah anggota yang sudah mencapai 762 ribu dengan total asset 5-8 trilliun. Dalam koperasi Syariah prinsipnya berlandaskan pada Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat (2) yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan melarang sebaliknya dengan mengandung dua unsur di dalamnya, yakni tolong-menolong *(ta'awun*) dan kerjasama (*syirkah)*.[39]

Adapun koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa arab. Syirkah merupakan suatu wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, dan halal yang terpuji dalam islam.[40] Adapun dalam islam prinsip kerjasama dengan tujuan mencari ridha Alloh dan

---

[38] Maria Ira Susanti, "Peran Koperasi Serab Usaha (KSU) " Mitra Maju" Dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat", *dalam jurnal Ejournal Ilmu Pemerintah*,3(2) 2015 : 558-570 ISSN 0000-0000, EJournal.ip.fisip.unmul.org

[39] Triana Sofiana, Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem hukum Koperasi Nasional , *dalam jurnal Hukum Islam (HJI)* Vol. 12 Edisi Desember 2014 , http ://e-jurnal.stain.-pekalongan.ac.id/index.php/jhi ISNN (p) : 1829-7382

[40] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2013), hal.93

selama perbuatan tersebut tidak melenceng dari agama islam dan tidak merugikan salah satu pihak maka hal tersebut diperbolehkan.

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa koperasi syariah dalam menjalankan operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah apabila yang mendekati *fitrah sunalloh*, yang merupakan sesuai dengan kebutuhan,kondisi, potensi serta norma-norma agama yang menghindarkan dari kesalahan materiaslisme maupun kapitalisme. Dengan tujuan mengindarkan manusia dari berbagai penyimpangan moral dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan koperasinya.

Berikut ini merupakan penyimpangan dalam koperasi yang dilarang dalam islam :

a. Maysir artinya segala bentuk spekulasi baik itu judi yang mematikan sector riil dan tidak berproduktif.
b. Asusila artinya segala bentuk praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
c. Gharar artinya segala bentuk transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga hal tersebut akan berpotensi untuk merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan oleh prinsip dasar islam

d. Riba artinya segala bentuk distorsi mata uang yang menjadi komuditas dengan mengenakan biaya tambahan seperti (bunga) pada transaksi kredit.[41]

Adapun kemunculan koperasi syariah di Indonesia yaitu seiringan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang saat ini mulai mengalami perkembangan di Indonesia. Yang pada awal mulanya tujuan dari lembaga keuangan syariah tersebut untuk memenuhi pembiayaan mikro yang sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah, yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional maka didirikanlah perbankan seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dan Koperasi fungsi dari koperasi syariah tidak berbeda dari koperasi yang lain yakni tujuannya untuk menghimpun dana dan pembiayaan dari masyarakat yang membedakan hanyalah prinsip dari penghimpunan dana dan pembiayaannya saja.

Prinsip Koperasi Syariah sebagai berikut[42] :

1. Kekayaan merupakan amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
2. Manusia diberi kebebasan untuk bermua'amalah selama bersamaan sesuai dengan ketentuan syariah

[41] Ibid, *Lembaga Ekonomi Syariah…*hal.100-101
[42] Triana Sofiana, *Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah….*hal 138

3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap unsur ribawi dan serta pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.

D. Pendapatan Masyarakat

1. Pengertian pendapatan

Demikian pula mengenai pendapatan yang saat ini digunakan untuk mengukur standart hidup masyarakat, pendapataan akan mengambarkan bagaimana sesorang tersebut dibedakan berdasarkan tingkat stratanya baik miskin atau kaya. Bahkan di beberapa Negara pendapatan sebagai tolak ukur untuk menentukan Negara tersebut maju atau tidak meskipun faktor pendapatan bukan satu-satunya indikator atau sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat namun dengan mengetahui tingkat pendapatan seseorang dapat dikatakan sejahtera atau tidak hal tersebut memang benar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha)[43].

Sedangkan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, sewa, gaji, komisi atau ongkos.[44]

---

[43] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1998),hlm 185

[44] BN, *Marbun,Kamus Manajemen*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,2003), hlm 230.

Sukirno menyatakan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.[45] Maksutnya *pendapatan merupakan hasil dari usaha yang kita keluarkan untuk dapat menghasilkan uang atau gaji*. Sehingga untuk mendapatkan gaji atau uang diperlukan usaha untuk mendapatkannya dengan cara bekerja, entah di dipasar, laut atau dimanapun guna memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Sadono Sukirno,pendapatan dapat dihitung dengan tiga cara yaitu [46]:

1. Cara pengeluaran artinya pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa.
2. Cara Produksi. Artinya cara menghitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Cara Pendapatan . Artinya pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima.

2. Konsep Pendapatan Masyarakat

Adapun yang dimaksut dengan pendapatan masyarakat adalah penerimaan gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu ataupun kelompok rumah tangga selama satu bulan

[45] Anton,Sudrajat. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang Muslim,*dalam jurnal STEI,Cirebon*.Vol.8.1 Februari 2014,diakses pada tanggal 17 September 2018,pkl 11.00 WIB

[46] Hestanto, Teori Pendapatan Ekonomi Menurut Para Ahli AnekaIlmu http://Walangkopo99.blogspot.com/2015/05,diakses pada tanggal 17 September 208, pkl 22.45 WIB

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu ada pula pendapatan sampingan yang artinya merupakan pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan dalam menunjang dan menambah pendapatan pokok.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soekarwati bahwa pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka konsumsi akan bertambah dan kualitas adari barang tersebut akan menjadi pusat perhatian pula. Contohnya bila adanya penambahan pendapatan pada komoditi beras yang awalnya kurang baik, namun dengan adanya penambahan pendapatan maka, konsumsi beras akan menjadi kualitas yang lebih baik.[47] Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa "*Untuk memperbesar pendapatan, maka seseorang anggota keluarga akan mendapatakannya dari sumber lain sehingga pendapatannya bertambah*".[48]

[47] Soekarwati, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta : Salemba Empat,2002),hlm. 132
[48] Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo,2001),hlm.3

3. **Jenis-jenis Pendapatan**

Berikut ini merupakan beberapa klarifikasi pendapatan menurut Sukirno :

a. Pendapatan Pribadi adalah semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu Negara.

b. Pendapatan Disposibel adalah pendapatan pribadi yang harus dipotong pajak yang dibayarkan oleh penerima pendapatan sisa dari pengurangan pajak inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.

c. Pendapatan Nasional adalah seluruh barang-barang jadi dan jasa- jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

4. Faktor- faktor yang mempengaruhi Pendapatan

Menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor , antara lain[49] :

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian

2) Harga perunit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerja sampingan.

[49] Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga,2002), hlm.150

Menurut Sujarno, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan nelayan yaitu : pengalaman, musim, alat tangkap ikan, bahan bakar. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan :

1) Faktor Internal. Merupakan faktor dari dalam yang terdiri dari pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang berani mengambil risiko, serta cepat puas dan kebiasaan lain yang tidak mengandung modernisasi.
2) Faktor Eksternal. Proses produksi didominasi oleh toke pemilik perahu dan sifat pemasaran produksi hanya dikuasai kelompok dalam bentuk pasar monopsony.[50]

Adapun tingkat pendapatan nantinya akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Artinya bahwa hubungan pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hubungan yang penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Realitanya bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, maka pengeluaran konsumsi juga akan turun secara otomatis. Artinya bahwa tinggi maupun rendahnya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatan.[51]

---

[50] Aprilia,"Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Nelayan Muara Angke". *dalam jurnal Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatulloh,2016. hlm 27

[51] Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen",*dalam jurnal Journal Ekonomika Universitas Almulsim Bireuen Aceh,* Vol.IV No. 7 : 9

5. Pendapatan menurut Perspektif Ekonomi Islam

a. Prinsip pendapatan

Pendapatan menurut Sukirno adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.[52] Dalam konsep Islam setiap pendapatan yang diterima, selalu disisihkan sebagian untuk zakat, infaq, dan sodaqoh tanpa mengurangi nominal untuk dapat ditabung, namun akan mengurangi nominal yang akan dikonsumsi. Jadi antara pendapatan yang diterima oleh seseorang akan berpengaruh pula pada konsumsi yang akan dilakukannya.

Adapun dalam prinsip Pendapatan maka pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Dalam prinsip islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas permasalahan upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerjanya tanpa harus melanggar hak-hak yang sah dari majikan.[53]

Prinsip ini terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut :

---

[52] Anton,Sudrajat."Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang Muslim",*dalam jurnal STEI,Cirebon*.Vol.8.1 Februari 2014,diakses pada tanggal 17 September 2018,pkl 11.00 WIB

[53] Bagus Baidhawi, dan Irham Zaki, Implemtasi Konsumsi Islami Pada Pengajar Pondok Pesantren,*dalam jurnal* JESTT Vol 1 No.9 September 2014, Universitas Airlangga.

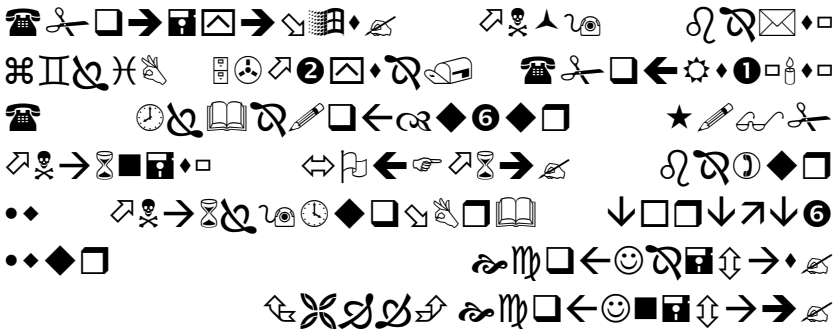

Artinya : *jika kamu tidak melaksanakanya (meninggalkan sisa riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya ketahuilah,tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*[54]

b. Distribusi pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga

Adapun nilai-nilai islam merupakan faktor intern dalam rumah tangga muslim, maka seharusnya dipahami bahwa seluruh proses dalam aktivitas ekonomi di dalamnya , harus dilandasi dengan legalitas halal dan haram, mulai dari produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, dan investasi. Dimana aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi landasan seorang muslim dalam melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Hal ini karena islam tidak bisa menolenir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena cara distribusi

[54] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat,* (Jakarta : CV Pustaka Agung Harapan,2006),hal.59

pendapatan keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunah).[55]

c. Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi islam bahwa, seluruh kegiatan manusia dituntun oleh ajaran islam mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang, serta menganalisis masalah ekonomi. Supaya manusia sadar dan berusaha untuk mencapai maslahah.[56] Adapun dalam agama islam juga diatur tentang pola konsumsi manusia yang membuat manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya.

Sebagaimana hal islam mengatur jalan hidup manusia melalui Al-Qur'an dan Al-hadist, supaya manusia dapat terhindar dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Pola konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah SAW akan membuat manusia lebih sejahtera. Berikut ini merupakan pertimbangan dalam konsumsi menurut Sudarsono yaitu[57] :

a. Manusia tidak berkuasa sepenuhnya terhadap detail permasalahan ekonomi masyarakat. Dimana terselenggaranya

[55] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*,(Kencana Prenadamedia Group,2014), Edisi Pertama, hlm 135

[56] Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008),hlm.16

[57] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia,Kampus Fakultas UII,2017), Hlm.167-168

kehidupan manusia diatur oleh Allah, dan manusia tidak dapat memaksakan cara hidup orang lain dan sebaliknya.

b. Adapun dalam konsep islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi umat muslim. Dimana batasan fisik merefleksikan pola yang digunakan dalam melakuakan aktivitas konsumsi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pola konsumsi yang berlebihan.

E. Tinjauan Penelitian terdahulu

Menurut Maria Ira Susanti,.[58] dalam Jurnalnya yang berjudul "Peran Koperasi Serba Usaha Mitra Maju dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat", hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan koperasi dilihat dari tepatnya pemberian pinjamaan modal kepada anggota koperasi sehingga anggota lebih memilih meminjam di koperasi tersebut daripada ke bank. Selain itu koperasi memiliki unit usaha POM bagi anggota dan non anggota. Hal ini dilakukan karena daerah tersebut masih kurangnya ketersediaan bahan bakar seperti POM pertamina, pembagian Sisa Hasil Usaha juga berjalan dengan baik, dan hasil tingkat kepuasan terhadapa koperasi tersebut sangat memuaskan karena pelayanan yang diberikan koperasi dan anggota dilakukan dengan baik.

[58] Maria Ira Susanti, "Peran Koperasi Serab Usaha (KSU) " Mitra Maju" Dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat", *dalam jurnal Ejournal Ilmu Pemerintah*,3(2) 2015 : 558-570 ISSN 0000-0000, EJournal.ip.fisip.unmul.org

Perbedaan dengan peneliti bahwa peneliti hanya pada unit usaha yang berbeda yaitu penelitian ini mengembangkan unit bahan bakar seperti POM sedangkan peneliti melakukan penelitian di unit usaha Alfamart.

Menurut Rohmiati Amini dkk,[59] dalam jurnalnya yang berjudul "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Study kasus pada Nelayan yang tergabung dalam KSU Samudra Biru di Kecamatan Ampenan Kota Mataram)" bahwa tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dalam melakukan kegiatan produksi dengan cara menyusun strategi peningkatan kesejahteraan melalui strategi analisis SWOT, untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif induktif yang berbeda dengan penelitian kualitatif interaktif. Serta stategi pemberdayaan peneliti tidak mengunakan analisis SWOT.

Menurut Winny Retna Melani dkk, dalam jurnalnya yang berjudul "Peran Koperasi dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Study kasus : Koperasi Serba Usaha Citra Nelayan Tanjungunggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)" bahwa dalam penelitian tersebut meneliti mengenai permasalahan kesejahteraan anggota koperasi dengan solusi

[59] Rohmiati Amini dkk, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Study kasus : Nelayan yang tergabung dalam KSU Samudra Biru di Kecamatan Ampenan Kota Mataram), *dalam jurnal FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Nadhatul Wathan Mataram*, Vol 12 No.11 2018, ISSN 1978-3787 (cetak)., ISSN 2615-3505 (online)

pengembangan Koperasi Serba Usaha dengan cara mengembangkan sisitem penangkapan ikan, memanfaatkan sumber daya yang ada, melakukan pelatihan peningkatan ketrampilan teknis manajerial, merintis usaha pengolahan ikan dan melakukan diversifikasi produk koperasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti terletak pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan solusi yang digunakan dalam menyejahterakan anggota dimana penelitian ini berfokus pada produktifitas.[60]

Menurut Nora Anggra Geni[61], dalam penelitiannya tentang Pemanfaatan Kredit Mikro melalui Koperasi Oleh Nelayan bahwa pemanfaatan koperasi tersebut seperti menyediakan kebutuhan kapal, perdagangan ikan, usaha ikan teri, usaha kerambak, dan usaha pembuatan kapal. Adapun penelitian ini mengunakan jenis kualitatif dan mengutamakan metode observasi, wawancara serta dokumen. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada jenis pemanfaatan yang diutamakan dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi adapun penelitian yang diteliti oleh peneliti mengunakan strategi yang berbeda dan tidak untuk usaha kerambak, namun produktivitas hasil laut nelayan saja.

---

[60]Winny Retna Melani dkk, "Peran Koperasi dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan (Study kasus : Koperasi Serba Usaha Citra Nelayan Tanjungunggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)", *dalam jurnal). dalam jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji TanjungPinang,*2008.

[61] Nora Anggra Geni," Pemanfaatan Kredit Melalui Koperasi oleh Nelayan." *dalam jurnal artikel STKIP PGRI* Sumatra Barat Padang,2015

Menurut Slamet Sobari[62] melalui jurnal penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Koperasi Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya, menyimpulkan bahwa modal utama terhadap keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejateraan angotanya terletak pada idealisme dan keberanian bertindak dari pengelola untuk membangun koperasi. Dan faktor-faktor lain seperti sarana untuk meningkatkan perkembangan koperasi, dukungan dari pemerintah, pengalaman bisnis dari pengelola koperasi, dan adanya kompetitor diharapakan akan dapat diatasi dengan membangun system pasar bersaing. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak adanya system pasar bersaing dalam peningkatan pendapatan nelayan.

Menurut Budi Astoni[63], melalui skipsinya Peran Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara bahwa dengan adanya koperasi nelayan tersebut masyrakat nelayan muara angke membuat laju perekonomian disana menjadi terpacu lebih cepat karena terdapat lembaga yang memberdayakan masyarakatnya. Melalui program kerja dalam bidang organisasi dan manajeman, permodalan, dan bidang secretariat serta kesejahteraan sosial. Adapun penelitian ini

[62] Slamet Sobari, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejateraan Anggotanya."(*Skripsi* ,Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura,2010*)*

[63] Budi Astoni," Peran Koperasi Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara".*(Skprisi*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta,2009

mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terletak pada program kerja yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Ully Hikmah Andini, Mochammad Soleh, Ainul Hidayat[64], dalam penelitiannya yang berjudul " Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal menuju Desa Tidak Tertinggal " dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengambilan data dengan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Berdasarkan hasil survey, pemberdayaan ekonomi dilakukan dapat dilihat dari upaya pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, perencana, pengawas dan evaluator. Dengan memanfaatkan potensi desa seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UKM. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang terletak pada jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif sedangkan perbedaannya dilihat dari subyek yang melakukan pemberdayaan yang berbeda, yakni penelitian tersebut dilakukan oleh pemerintah dan dinas yang terkait sedangkan pemberdayaan sekarang dilakukan oleh koperasi serba usaha.

Menurut Ahmad Septiawan Badawi ,[65] dalam jurnalnya yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Serba Usaha Tangerang Kuat Sejahtera melalui (TKS) MART ", bahwa penelitian ini

[64] Ully Hikmah,Mochamad Saleh, Ainul Hidayat ,"Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal menuju Desa Tidak Tertinggal."*Tidak diterbitkan* Universitas Brawijaya Malang.

[65] Ahmad Septiawan Badawi,"Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Serba Usaha Tangerang Kuat Sejahtera melalui (TKS) MART",*dalam jurnal Skripsi Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah* Jakarta,2016

mengunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif diamana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan ekonomi anggota dan faktor penghambatnya. Adapun faktor penghambat seperti jarak, tanngungjawab antar anggota yang kurang, adanya pesaing yang serupa dengan (TKS) MART. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang mengunakan kualitatif deskriptif yang berbeda dengan kualitatif interaktif selain itu persamaaanya teletak pada unit usaha perdagangan dengan konsep minimarket.

Menurut Susilawetty dan Karna Supena,[66] dalam jurnal "Peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor", bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan eksploratif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran koperasi serba usaha Mutiara Mandiri dalam meningkatkan perekonomian dengan cara menyejahterakan anggota koperasi serta faktor penghambatnya baik secara internal seperti : kurang paham dan peduli dengan perilaku berkoperasi, dan eksternal : tidak memiliki asset tetap. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti yaitu produk dari koperasi hanya simpan pinjam sedangkan yang diteliti oleh peneliti memiliki unit perdagangan. Persamaan terletak pada jenis penelitiannya yang menggunakan kualitatif deskriptif dan eksporatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif interaktif.

[66] Susilawetty dan Karna Supena, "Peran Koperasi Serba Usaha Mutiara Mandiri untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gunung Sindur Kabupaten Bogor", *dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2013. http:journal.jurwidyakop3.com

Menurut Raidayani[67] dkk, dalam jurnalnya yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi di Kabupaten Aceh Barat" menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda. Penelitian ini mengkaji pengaruh modal usaha, jumlah anggota, volume usaha serta asset koperasi terhadap sisa hasil usaha pada koperasi dalam periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha, jumlah anggota dan asset koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yang mengunakan kuantitatif sedangakn peneliti mengunakan kualitatif. Sedangkan untuk persamaanya teletak pada obyek yang diteliti yaitu koperasi.

[67] Raidayani dkk,. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi di Kabupaten Aceh Barat", *dalam jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.3 No. 2, September 2017, ISSN. 2502-6976

F. Kerangka Konsep Teori

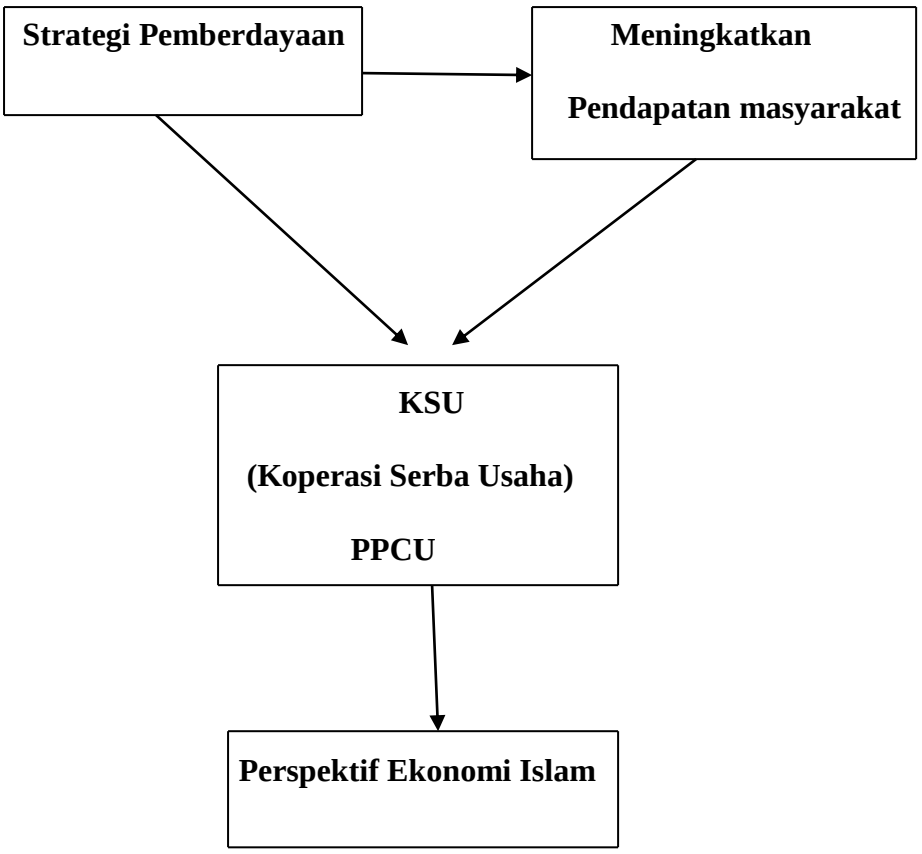

Keterangan

Koperasi Serba Usaha :. Koperasi serba usaha adalah dimana koperasi yang kegiatan usahanya diberbagai segi perekonomian seperti bidang produksi, konsumsi, pengkreditan, dan jasa.[68]

Strategi Pemberdayaan : Strategi Pemberdayaan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,disertai

[68] Maria Ira Susanti, "Peran Koperasi Serab Usaha (KSU) " Mitra Maju" Dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat", *dalam jurnal Ejournal Ilmu Pemerintah*,3(2) 2015 : 558-570 ISSN 0000-0000, EJournal.ip.fisip.unmul.org

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.[69]

Peningkatan Pendapatan : Merupakan peningkatan pendapatan berupa uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah,sewa, gaji, komisi atau ongkos.[70]

Perspektif Ekonomi Islam : Perspektif Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada Ketuhanan. Esensi dari ekonomi ini memiliki tujuan akhir kepada Alloh, dan memanfaatkan sarana yang tidak terlepas dari syariat islam.

[69]Husein,Umar, *Strategic Management in Action*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2001)
[70]BN, Marbun,*Kamus Manajemen*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,2003),hlm 230.